

**RENCANA KERJA TAHUNAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DEPOK**



**TAHUN ANGGARAN 2020
PERUBAHAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok Tahun 2020 Perubahan dapat terselesaikan sebagaimana dijadikan pedoman dan pengendali pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok antara lain penegakan Perda; penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum; serta perlindungan masyarakat.

RKT Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok disusun berdasarkan pada Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 dan Tahun Anggaran 2020 Perubahan, sehingga dilakukan penyesuaian pada pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka mewujudkan Kota Depok yang Unggul, Nyaman, dan Religius.

Secara substantif RKT Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok merupakan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Satuan Pamong Praja Kota Depok Tahun 2016-2021. RKT ini juga merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok pada akhir tahun anggaran 2020 perubahan.

Kami menyadari bahwa penyusunan RKT Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok Tahun 2020 perubahan ini belum sepenuhnya sempurna, karena itu saran konstruktif dibutuhkan.

Depok, Oktober 2020

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Depok**

Ttd.

N Lienda Ratnanurdianny, SH.,M.Hum
NIP.197001271998032004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Dasar Pemikiran	3
	1.4. Permasalahan yang dihadapi	3
	1.5. Prioritas Pembangunan	3
	1.6. Struktur Pemerintahan	4
BAB II	RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5
	2.1. Visi	5
	2.2. Misi	5
	2.3. Tujuan	5
	2.4. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran	6
	2.5. Kebijakan dan Program	7
BAB III	RENCANA KINERJA TAHUN 2020 PERUBAHAN	8
	3.1. Sasaran yang dipilih	8
	3.2. Indikator Kinerja Sasaran yang Terpilih	8
	3.3. Program yang terpilih	9
BAB IV	PENUTUP	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, selanjutnya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Selain itu, sebagai wahana proses yang akan memberikan prespektif mengenai apa yang ingin dihasilkan ke depan, memberikan target tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan dan dapat digunakan untuk menyusun prioritas kegiatan yang akan dibiayai dari sumber daya yang terbatas.

Rencana Kinerja Tahunan bermanfaat untuk menghubungkan Renstra dengan perencanaan operasional yang lebih terinci, membantu pencapaian hasil pelaksanaan program, dapat menjadi suatu *performance agreement*, memudahkan proses pengukuran kinerja, membantu monitoring dan evaluasi kinerja, membantu menetapkan kinerja periode berikutnya, serta memudahkan penetapan spesifikasi pekerjaan atas dasar capaian kinerja

Dalam penyusunan suatu Rencana Kinerja Tahunan perlu terlebih dahulu ditentukan atau ditetapkan beberapa hal seperti :

1. Mempelajari sasaran berikut indikatornya yang ingin dicapai;
2. Menentukan program/ kegiatan dan mempertimbangkan tingkat kinerja yang dapat dicapai;
3. Mempertimbangkan kemampuan riil pengerahan sumber daya;
4. Menetapkan tingkat kinerja yang ingin dicapai dalam bentuk target;
5. Mengintegrasikan rencana kinerja dengan rencana kerja yang lebih operasional.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 tahun 2008 tentang RPJPD tahun 2006 – 2025.
8. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Tahun 2016 – 2021 (tanggal 29 Desember 2017).
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok.
10. Peraturan Walikota Depok Nomor 110 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

1.3 Dasar Pemikiran

Dasar pemikiran Penyusunan Rencana Kinerja (RKT) Tahun 2020 Perubahan ini, adalah :

1. Sebagai dokumen kinerja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok.
2. Sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok sesuai Program dan Kegiatan.
3. Memberikan gambaran terencana terhadap sasaran yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok.

1.4. Permasalahan yang Dihadapi

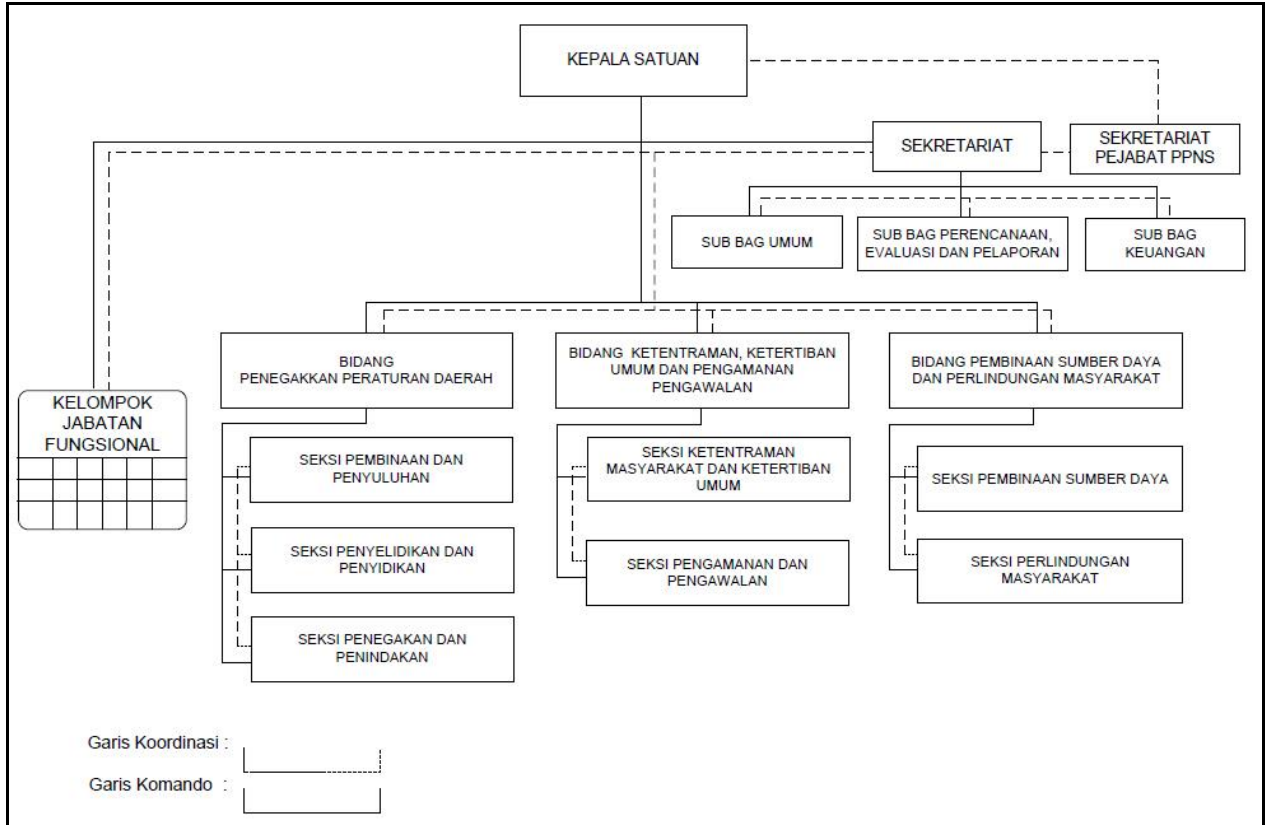
- a. Lemahnya tingkat koordinasi dan kolaborasi antar Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja ditandai dengan belum maksimalnya Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal) pada Dinas pengampu Perda;
- b. Masih ditemui pelanggaran-pelanggaran yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Kurangnya sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Pembinaan dan pengawasan implementasi Perda Kota Depok yang belum maksimal;
- f. Sejumlah Perda dalam ketentuan pidananya mencantumkan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan, sehingga dalam pemberkasannya membutuhkan waktu yang relatif lama.

1.5. Prioritas Pembangunan

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok mendukung Misi Kota Depok yang ke-1 (satu) yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik.

1.6. Struktur Pemerintahan

**STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DEPOK**



BAB II

RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2.1. Visi Satuan Polisi Pamong Praja

Visi Satuan Polisi Pamong Praja adalah Terwujudnya “Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius.”

2.2 Misi Satuan Polisi Pamong Praja

Sebagai penjabaran visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok di atas disusunlah misi pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok 2016-2021 yang telah dilakukan penyesuaian dengan Penyusunan RPMJD Perubahan Tahun 2016-2021; sehingga Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok masuk pada Misi Ke-1 RPJMD Perubahan Tahun 2016-2021, yakni “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan.”

2.3. Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja

Tujuan pada misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok Tahun 2016–2021, sebagai berikut :

MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan.

Tujuan dari MISI I : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Ketertiban Umum.

2.4. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran merupakan tolak ukur keberhasilan misi yang dijalankan dalam mencapai tujuan. Berikut ini sasaran pada misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok Tahun 2016-2021 :

MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan.

Tujuan dari MISI I : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Ketertiban Umum

Sasaran dari tujuan MISI I, dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik;

Indikator Kinerja Sasaran :

1. Predikat SAKIP Satpol PP.
2. Persentase Aset Satpol PP kondisi baik.
3. Tingkat Profesionalitas Aparatur Satpol PP.

2. Meningkatnya Ketertiban Umum

Indikator Kinerja Sasaran :

1. Cakupan Penegakan Perda dan/atau Perwal.
2. Persentase Kawasan Rawan Trantibum yang Tertib.
3. Cakupan Rasio Petugas Linmas.

3. Meningkatnya Ketentraman Masyarakat

Indikator Kinerja Sasaran :

1. Persentase Mitra Kerja Satpol PP yang aktif.
2. Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat.

2.5 Kebijakan dan Program

Untuk mencapai Sasaran diperlukan suatu kebijakan dan program. Berikut ini adalah Kebijakan dan Program untuk mencapai sasaran dari setiap misi Satuan Polisi Pamong Praja.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Ketertiban Umum	1. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik	1. Predikat SAKIP Satpol PP	1. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja, Keuangan. 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Peningkatan Administrasi Perkantoran 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
		2. Persentase Aset Satpol PP kondisi baik	
		3. Tingkat Profesionalitas Aparatur Satpol PP	
	2. Meningkatnya Ketertiban Umum	4. Cakupan Penegakan Perda dan/atau Perwal	
	3. Meningkatnya Ketentraman Masyarakat	5. Persentase Kawasan Rawan Trantibum yang Tertib	
		6. Cakupan Rasio Petugas Linmas	
		7. Persentase Mitra Kerja Satpol PP yang aktif	
		8. Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat	

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUN 2020

3.1 Sasaran Yang Terpilih

Sasaran yang terpilih di tahun 2020 perubahan ini adalah sebanyak 3 (tiga) sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik.
2. Meningkatnya Ketertiban Umum.
3. Meningkatnya Ketentraman Masyarakat.

Sasaran ini dipergunakan untuk mencapai tujuan dari misi Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2020, sehingga apa yang direncanakan dalam Rencana Kinerja Tahunan dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

3.2 Indikator Kinerja Sasaran Yang Terpilih

Indikator Kinerja dari sasaran yang terpilih pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

SASARAN TERPILIH	INDIKATOR KINERJA SASARAN TERPILIH
1. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik	1. Predikat SAKIP Satpol PP
	2. Persentase Aset Satpol PP kondisi baik
	3. Tingkat Profesionalitas Aparatur Satpol PP

SASARAN TERPILIH	INDIKATOR KINERJA SASARAN TERPILIH
2. Meningkatnya Ketertiban Umum	4. Cakupan Penegakan Perda dan/atau Perwal
	5. Persentase Kawasan Rawan Trantibum yang Tertib
	6. Cakupan Rasio Petugas Linmas
3. Meningkatnya Ketentraman Masyarakat	7. Persentase Mitra Kerja Satpol PP yang aktif
	8. Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat

3.3 Program Yang Terpilih

Jumlah program pada tahun 2020 perubahan sebanyak 6 (enam) program yang didukung 36 (tiga puluh enam) kegiatan dengan pagu indikatifnya **Rp. 20.215.427.700,00**.

Ke 6 (enam) Program tersebut antara lain :

1. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja, Keuangan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Administrasi Perkantoran.
4. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan.
6. Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat.

Berikut ini adalah tabel daftar program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2020 Perubahan :

PEMERINTAH KOTA DEPOK
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (P-RENJA) TAHUN 2020 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Halaman 1 dari 5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah / Berkurang	Alasan Perubahan
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8-5)	11
1.	URUSAN WAJIB			22,119,010,100			20,215,427,700		(1,903,582,400)	
1.01.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR			22,119,010,100			20,215,427,700		(1,903,582,400)	
1.01.05.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			22,119,010,100			20,215,427,700		(1,903,582,400)	
1.01.05.01.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			22,119,010,100			20,215,427,700		(1,903,582,400)	
1.01.05.1.01. 05.01.001.	Peningkatan administrasi perkantoran	Persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	1,791,093,000		100%	1,093,144,500		(697,948,500)	
1.01.05.1.01. 05.01.001.01.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	25 Jenis	65,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja	25 Jenis	65,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja	-	
1.01.05.1.01. 05.01.001.02.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	15 Jenis	57,982,000	Satuan Polisi Pamong Praja	14 Jenis	48,140,000	Satuan Polisi Pamong Praja	(9,842,000)	Plakat masih mencukupi, maka dialihkan ke pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang telah di refocusing.

Rencana Kerja Tahunan

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok
Tahun Anggaran 2020 Perubahan

1.01.05.1.01. 05.01.001.03.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20 Jenis	29,990,000	Satuan Polisi Pamong Praja	20 Jenis	29,990,000	Satuan Polisi Pamong Praja	-	
1.01.05.1.01. 05.01.001.04.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	20 Jenis	85,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja	20 Jenis	85,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja	-	
1.01.05.1.01. 05.01.001.05.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis Makanan dan Minuman	4 jenis	947,496,000	Satuan Polisi Pamong Praja	4 jenis	552,888,000	Satuan Polisi Pamong Praja	(394,608,000)	Refocusing
1.01.05.1.01. 05.01.001.06.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Aparatur Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	273 OH Luar Daerah; 20 OH Dalam Daerah	605,625,000	Satuan Polisi Pamong Praja	173 OH Luar Daerah; 9 OH Dalam Daerah	312,126,500	Satuan Polisi Pamong Praja	(293,498,500)	Refocusing dengan mengurangi target kinerja kegiatan menjadi 130 OH Luar Daerah, 15 OH Dalam Daerah
1.01.05.1.01. 05.01.002.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	1,680,112,000		100%	1,706,832,000		26,720,000	
1.01.05.1.01. 05.01.002.01.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas	50 Kendaraan	1,128,815,000	Satuan Polisi Pamong Praja	50 Kendaraan	1,128,815,000	Satuan Polisi Pamong Praja	-	Penyesuaian hasil penginputan DPA
1.01.05.1.01. 05.01.002.02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	7 Jenis (repiter, AC, Komputer, Printer, Jaringan Internet, HT, Elektronik lainnya	52,675,000	Satuan Polisi Pamong Praja	7 Jenis (repiter, AC, Komputer, Printer, Jaringan Internet, HT, Elektronik lainnya	52,675,000	Satuan Polisi Pamong Praja	-	Penyesuaian hasil penginputan DPA

Rencana Kerja Tahunan

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok
Tahun Anggaran 2020 Perubahan

1.01.05.1.01. 05.01.002.03.	Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian PDH	100 Stel	130,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja	100 Stel	130,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja	-	
1.01.05.1.01. 05.01.002.04.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Inventaris Kantor	8 Jenis	197,182,000	Satuan Polisi Pamong Praja	8 Jenis	109,842,000	Satuan Polisi Pamong Praja	(87,340,000)	Sebelumnya anggaran kegiatan ini di refocusing atau Nol Rupiah, namun perlu penambahan anggaran kembali untuk memenuhi ketersediaan peralatan dan perlengkapan Sekretariat PPNS
1.01.05.1.01. 05.01.002.05.	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan	100 Stel dan Sepatu PDL	150,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja	120 Stel	180,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja	30,000,000.00	Penyesuaian hasil penginputan DPA
1.01.05.1.01. 05.01.002.09.	Pengadaan Pakaian Dinas Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Dinas Hari-Hari Tertentu; Jumlah Pakaian Dinas Khusus Satgas I Pol PP	15 Stel	20,940,000	Satuan Polisi Pamong Praja	75 Stel	105,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja	84,060,000	Perlunya penyediaan Pakaian Dinas Khusus Satgas 1, dan Pakaian Dinas Khusus Satgas Trantibum menyesuaikan dengan Permendagri 17 Tahun 2019

Rencana Kerja Tahunan

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok
Tahun Anggaran 2020 Perubahan

1.01.05.1.01. 05.01.005.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi	45%	308,989,800		45%	170,857,900		(138,131,900)	
1.01.05.1.01. 05.01.005.01.	Pembinaan dan Pelatihan Linmas	Jumlah Anggota Satlinmas	126 Orang	136,599,800	Satuan Polisi Pamong Praja	63 Orang	59,151,900	Kota Depok	(77,447,900)	Refocusing
1.01.05.1.01. 05.01.005.02.	Bimtek Satpol PP	Jumlah Peserta Pelatihan	60 Orang	172,390,000	Satuan Poisi Pamong Praja	40 Orang	111,706,000	Kota Depok	(60,684,000)	Refocusing
1.01.05.1.01. 05.01.006.	Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	BB	39,999,000		BB	11,418,000		(28,581,000)	
1.01.05.1.01. 05.01.006.01.	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	5 Jenis (Lap Kinerja dan Keuangan 12 dok, 1 Dok LAKIP, 1 dok/data LPPD, 4 lap Triwulan, 2 lap Semesteran)	39,999,000	Satuan Polisi Pamong Praja	5 Jenis (Lap Kinerja dan Keuangan 12 dok, 1 Dok LAKIP, 1 dok/data LPPD, 4 lap Triwulan, 2 lap Semesteran)	11,418,000	Kantor Satpol PP	(28,581,000)	Sebelumnya kegiatan ini di Refocusing menjadi Nol Rupiah, dalam Renja Perubahan ditambahkan anggaran sebagai pendukung Nilai SAKIP
1.01.05.1.01. 05.01.020.	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat	Cakupan Penegakan Perda dan/atau Perwal; Cakupan Rasio Petugas Linmas	92%; 0,25	18,248,724,300		92%; 0,25	17,183,083,300		(1,065,641,000)	
1.01.05.1.01. 05.01.020.01.	Gelar Pasukan Satpol PP dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Pemeliharaan TRANTIBUM	Jenis Pelaksanaan Pemeliharaan TRANTIBUM	3 Jenis (tingkat Kota, tingkat Provinsi, tingkat Nasional)	106,575,000	Satuan Polisi Pamong Praja	0	0		(106,575,000)	Refocusing

Rencana Kerja Tahunan

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok
Tahun Anggaran 2020 Perubahan

1.01.05.1.01. 05.01.020.02.	Penertiban PKL	Jumlah titik lokasi PKL yang ditertibkan	62 Titik	1,049,604,000	Satuan Polisi Pamong Praja	52 lokasi	855,771,900	Kota Depok	(193,832,100)	Refocusing dengan mengurangi target kinerja kegiatan menjadi 52 titik/lokasi
1.01.05.1.01. 05.01.020.03.	Penertiban Perizinan	Jenis Perizinan yang ditertibkan	3 Jenis (100 IMB, 100 SIUP/HO , 250 Perizinan Lainnya Reklame dll)	114,999,800	Satuan Polisi Pamong Praja	3 Jenis (10 IMB, 10 SIUP/HO, 25 Perizinan Lainnya Reklame dll)	85,347,900	Kota Depok	(29,651,900)	Refocusing dengan mengurangi rincian target kinerja kegiatan menjadi 3 jenis (10 IMB, 10 SIUP/HO, 25 Perizinan lainnya Reklame dll)
1.01.05.1.01. 05.01.020.04.	Penertiban Bangunan Liar di lahan Fasos Fasum milik Pemerintah Kota Depok	Jumlah Titik lahan/lokasi Fasos Fasum yang ditertibkan	16 lokasi fasos fasum	1,076,970,000	Satuan Polisi Pamong Praja	16 lokasi fasos fasum	717,900,000	Kota Depok	(359,070,000)	Refocusing dengan mengurangi target kinerja kegiatan menjadi 12 lokasi fasos fasum
1.01.05.1.01. 05.01.020.05.	Penertiban PSK, Anjal, dan Gepeng	Jumlah PMKS yang ditertibkan	20 PSK (dan/atau yg diduga), 31 Anjal, 15 Gepeng	242,685,000	Satuan Polisi Pamong Praja	50 orang	201,000,000	Kota Depok	(41,685,000)	Refocusing dengan mengurangi target kinerja kegiatan menjadi : 20 PSK (dan/atau yg diduga), 30 Anjal/Gepeng

Rencana Kerja Tahunan

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok
Tahun Anggaran 2020 Perubahan

1.01.05.1.01. 05.01.020.06.	Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban	Jumlah Satgas Pol PP 212 orang selama 12 bulan, dan Tambahan Satgas Pol PP sebanyak 20 orang selama 3 bulan	212 Orang selama 12 bulan	10,548,613,600	Satuan Polisi Pamong Praja	232 Orang	10,872,913,600	Satuan Polisi Pamong Praja	324,300,000	Bertambahnya harga satuan BPJS yang didasarkan dengan UMK (Bukan pada Gaji Satgas Pol PP)
1.01.05.1.01. 05.01.020.07.	Penjagaan/Pengamanan dan Pengawasan Lingkup Pemerintah Kota Depok	Jenis Penjagaan/Pengamanan	6 jenis Pengamanan dan Pengawasan (Pamwal Walikota dan Wakil/Pejabat, Tamu Penting, Sidang Paripurna, Unras/Deomo, Hari Nasional dan Keagamaan, Hari Olahraga)	317,577,000	Satuan Polisi Pamong Praja	6 jenis Pengamanan dan Pengawasan (Pamwal Walikota dan Wakil/Pejabat, Tamu Penting, Sidang Paripurna, Unras/Deomo, Hari Nasional dan Keagamaan, Hari Olahraga)	315,576,900	Lingkup Pemerintah Kota Depok	(2,000,100)	
1.01.05.1.01. 05.01.020.08.	Pengamanan Hari Raya	Jumlah Pengamanan Hari Raya	2 Momentum (Idul Fitri dan Natal)	99,999,900	Satuan Polisi Pamong Praja	2 Momentum (Idul Fitri dan Natal)	99,999,900	Kota Depok	-	
1.01.05.1.01. 05.01.020.09.	Penertiban dan Monitoring Peredaran Minuman Beralkohol	Jumlah Kegiatan Penertiban	24 titik (12 titik dilokasi Tempat hiburan, 6 titik di lokasi pasar, 6 titik di lokasi umum)	147,999,900	Satuan Polisi Pamong Praja	19 lokasi	117,769,900	Kota Depok	(30,230,000)	Refocusing dengan mengurangi target kinerja kegiatan menjadi 20 titik/lokasi

Rencana Kerja Tahunan

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok
Tahun Anggaran 2020 Perubahan

1.01.05.1.01. 05.01.020.11.	Konsolidasi Satpol PP dengan Instansi terkait dalam rangka pemeliharaan Ketertiban Umum	Jumlah Konsolidasi	100 Dok	194,999,800	Satuan Polisi Pamong Praja	6 konsolidasi	16,692,000	Kota Depok	(178,307,800)	Refocusing dengan mengurangi target kinerja menjadi 3 dokumen hasil pelaksanaan konsolidasi Satpol PP
1.01.05.1.01. 05.01.020.14.	Sosialisasi Perda tentang Ketertiban Umum	Jumlah Lokasi Sosialisasi; Jumlah Kelompok Masyarakat Sadar Hukum	66 Lokasi ; 2 Kelompok sadar hukum	359,865,000	Satuan Polisi Pamong Praja	4 lokasi sosialisasi	20,385,000	Kota Depok	(339,480,000)	Refocusing
1.01.05.1.01. 05.01.020.15.	Pengadaan Papan Larangan/Segel	Jumlah Papan larangan/segel	45 papan larangan/ segel	120,000,000	Satpol PP	45 papan larangan/ segel	120,000,000	Kantor Satpol PP	-	
1.01.05.1.01. 05.01.020.16.	Penertiban dan Operasi Penegakan Perda tentang Ketertiban Umum (Sidang Tipiring)	Jumlah Sidang Tipiring	24 kali, 120 Orang	254,322,000	Satuan Polisi Pamong Praja	11 sidang tipiring	147,712,000	Pengadilan Negeri Depok	(106,610,000)	Pengurangan karena terkendala aturan protokol kesehatan pandemic Covid-19, Petugas Lapangan fokus melaksanakan patroli PSBB, Pengadilan Sidang Tipiring ditangguhkan selama PSBB, dan pelaksanaan Tipiring direncanakan pada bulan September 2020/Akhir Triwulan ke-III

Rencana Kerja Tahunan

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok
Tahun Anggaran 2020 Perubahan

1.01.05.1.01. 05.01.020.17.	Pengawasan dan Penertiban Pelajar	Jumlah lokasi pengawasan dan penertiban pelajar	24 Lokasi (8 Kali di lokasi pasar Swalayan, 8 Kali di lokasi warnet, 8 Kali di lokasi Umum)	72,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja	10 lokasi	43,930,000	Kota Depok	(28,070,000)	Pengurangan karena terkendala aturan protokol kesehatan pandemic Covid-19, Petugas Lapangan fokus melaksanakan patroli PSBB, Pelajar menggunakan system Daring sampai waktu yang belum ditentukan, dan kegiatan akan dilaksanakan pada Triwulan ke-IV
--------------------------------	-----------------------------------	---	---	------------	----------------------------	-----------	------------	------------	--------------	---

Rencana Kerja Tahunan

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok
Tahun Anggaran 2020 Perubahan

1.01.05.1.01. 05.01.020.18.	Penertiban dan Operasi Penegakan Perda (Penyegehan)	Jumlah Bangunan yang di segel	12 Bangunan	67,836,000	Satuan Polisi Pamong Praja	6 Bangunan	45,930,000	Kota Depok	(21,906,000)	Pengurangan karena terkendala aturan protokol kesehatan pandemic Covid-19, Petugas Lapangan fokus melaksanakan patroli PSBB, Satpol PP menunggu pelimpahan berkas dari DPMPTSP dalam hal Penyegehan Bangunan, dan kegiatan akan dilaksanakan pada Triwulan ke-IV
1.01.05.1.01. 05.01.020.19.	Penertiban dan Operasi Penegakan Perda (Pemusnahan Barang Bukti)	Jumlah pemusnahan barang bukti (minuman beralkohol)	1157 Buah (2 kali kegiatan)	67,934,000	Satuan Polisi Pamong Praja	1 pemusnahan barang bukti (mikhol)	34,117,000	Halaman Balaikota Depok	(33,817,000)	Pengurangan karena kegiatan akan dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali atau pada Triwulan ke-IV
1.01.05.1.01. 05.01.020.20.	Pemantauan Lokasi Rawan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah lokasi rawan gangguan keamanan dan lokasi rawan bencana alam	315 Lokasi	359,761,500	Satuan Polisi Pamong Praja	210 Lokasi	355,036,500	Kota Depok	(4,725,000)	Refocusing

Rencana Kerja Tahunan

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok
Tahun Anggaran 2020 Perubahan

1.01.05.1.01. 05.01.020.21.	Pengawasan dan Penertiban Kawasan Tanpa Rokok	Jumlah pelanggar di 7 kawasan Tanpa Rokok, jumlah sosialisasi	42 orang, 5 kali sosialisasi	79,999,800	Satuan Polisi Pamong Praja	2 tib KTR	47,599,800	Lingkup Pemerintah Kota Depok	(32,400,000)	Pengurangan karena terkendala aturan protokol kesehatan pandemic Covid-19, Petugas Lapangan fokus melaksanakan patroli PSBB, dan kegiatan akan dilaksanakan pada Triwulan ke-IV
1.01.05.1.01. 05.01.020.32.	Pengamanan Pilkada Tahun 2020	Terselenggaranya pengamanan Pilkada Tahun 2020 di setiap kelurahan	63 Kelurahan	459,459,000	Kota Depok	28 Pam Pilkada	577,877,900	Kota Depok	118,418,900	Dibutuhkan penambahan untuk keperluan peralatan dan perlengkapan yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengamanan Pilkada 2020
1.01.05.1.01. 05.01.020.33.	Penetapan anggota Satlinmas tingkat Kota Depok	Jumlah Anggota Satlinmas yang dilantik tingkat Kota	630 Orang	2,507,523,000	Kota Depok	630 Orang	2,507,523,000	Satuan Polisi Pamong Praja	-	Penyesuaian hasil penginputan DPA
1.01.05.1.01. 05.01.028.	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Cakupan Integrasi Perencanaan	100%	50,092,000		100%	50,092,000		-	
1.01.05.1.01. 05.01.028.01.	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen Renja dan 70 Peserta Forum OPD	50,092,000	Satuan Polisi Pamong Praja	1 Dokumen Renja dan 70 Peserta Forum OPD	50,092,000	Satuan Polisi Pamong Praja	-	Penyesuaian hasil penginputan DPA

Rencana Kerja Tahunan

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok
Tahun Anggaran 2020 Perubahan

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman semua jajaran yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun anggaran 2020 perubahan.

Rencana Kinerja Tahunan merupakan tolok ukur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan kinerja dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok pada tahun 2019. Maka perlu dicermati indikator kinerja dan target kinerja dalam hal pencapaiannya oleh Sekretariat, Bidang, dan Sub Bagian serta Seksi.

Dengan demikian kerjasama dan kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok dengan Perangkat Daerah yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan Kota Depok yang Unggul, Nyaman, dan Religius.

Depok, Oktober 2020

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Depok**

N Lienda Ratnanurdianny, SH.,M.Hum
NIP.197001271998032004